

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pendidikan terus menjadi topik yang sering diperbincangkan oleh banyak pihak. Pendidikan seperti magnet yang sangat kuat karena dapat menarik berbagai dimensi dalam kehidupan mulai dari politik, sosial, budaya dan ekonomi. Hubungan pendidikan dengan berbagai dimensi kehidupan tidak akan pernah lepas karena pengaruh timbale balik yang ditimbulkannya cukup besar. Bahkan pendidikan telah menjadi salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Seiring dengan arus modernisasi, perkembangan teknologi informatika juga turut berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan pendidikan yang berimbas pada pengelolaan dan pelaksanaannya.

Pemerintah selaku penanggung jawab terhadap proses penyelenggaraan pendidikan nasional berkewajiban menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003, pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

**Standard Nasional Pendidikan** (SNP) merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara dan atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standard Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standard Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standard Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Sebuah kebijakan yang telah diputuskan memang tidak terlepas dari problematika. Hal ini membuktikan bahwa harapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan, termasuk pada kegiatan kebijakan tentang standard nasional pendidikan. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab, baik berupa internal maupun eksternal. Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan system pendidikan sebagai pranata social yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Misi pendidikan nasional adalah: (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing ditingkat nasional, regional, dan internasional; (3) meningkatkan relevansi pendidikan dan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (4) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat

dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (5) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (6) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standard yang bersifat nasional dan global; dan (7) mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait dengan visi dan misi pendidikan nasional tersebut diatas, reformasi pendidikan meliputi hal-hal berikut:

*Pertama;* penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, dalam proses tersebut harus ada pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan, serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik.

*Kedua;* adanya perubahan pandangan tentang peran manusia dari paradigma manusia sebagai sumber daya pembangunan, menjadi paradigma manusia sebagai subjek pembangunan secara utuh. Pendidikan harus mampu membentuk manusia seutuhnya yang digambarkan sebagai manusia yang memiliki karakteristik personal yang memahami dinamika psikososial dan lingkungan kulturalnya.

*Ketiga;* adanya pandangan terhadap keberadaan peserta didik yang terintegrasi dengan lingkungan sosial-kulturalnya dan pada gilirannya akan menumbuhkan individu sebagai pribadi dan anggota masyarakat mandiri yang berbudaya. Hal ini sejalan dengan proses pentahapan aktualisasi intelektual, emosional dan spiritual

peserta didik didalam memahami sesuatu, mulai dari tahapan paling sederhana dan bersifat eksternal, sampai tahapan yang paling rumit dan bersifat internal, yang berkenaan dengan pemahaman dirinya dan lingkungan kulturalnya.

*Keempat*; dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional, diperlukan suatu acuan dasar oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggara pendidikan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, kriteria penyelenggara pendidikan dijadikan suatu pedoman untuk mewujudkan: (1) pendidikan yang berisimuan yang seimbang dan holistik; (2) proses pembelajaran yang demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis; (3) hasil pendidikan yang bermutu dan terukur; (4) berkembangnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan; (5) tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan berkembangnya pengelolaan pendidikan yang memberdayakan satuan pendidikan; dan (7) terlaksananya evaluasi, akreditasi dan sertifikasi yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Acuan dasar tersebut diatas merupakan standard nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu, standard nasional pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Standard nasional pendidikan memuat criteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Lingkup Standard Nasional Pendidikan (SNP) meliputi: (1) standard isi; (2) standard proses; (3) standard kompetensi lulusan; (4) standard pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standard sarana dan prasarana; (6) standard pengelolaan; (7) standard pembiayaan; dan (8) standard penilaian pendidikan. Standard Nasional Pendidikan Berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standard Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Dalam menilai pelaksanaan standard nasional pendidikan pemerintah melakukan akreditasi terhadap setiap jenjang satuan pendidikan, sebagaimana termuat dalam PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan BAB XIII Pasal 86 ditentukan sebagai berikut:

- (1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
- (2) Kewenangan akreditasi sebagai dimaksud pada ayat satu dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
- (3) Akreditasi sebagai dimaksud pada ayat satu dan ayat dua sebagai bentuk akuntabilitas public dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrument dan criteria yang mengacu kepada Standard Nasional Pendidikan.

Dengan diberlakukannya Standard Nasional Pendidikan, pemerintah memiliki kepentingan untuk memetakan sekolah menjadi sekolah yang sudah atau

hampir memenuhi Standard Nasional Pendidikan. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah mengategorikan sekolah yang telah memenuhi atau hampir memenuhi Standard Nasional Pendidikan kedalam kategori mandiri, dan sekolah yang belum memenuhi standard nasional pendidikan yang standard.

SMK Negeri 1 Balige sampai saat ini terus melakukan upaya peningkatan mutu sekolah dan secara berkesinambungan menata serta berupaya mengembangkan berbagai sector unggul untuk menjadi andalan sekolah. Sekolah diharapkan dapat mengetahui bidang apa yang menjadi prioritas untuk diperbaiki dan dikembangkan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan, ditemukan beberapa kesenjangan terkait dengan kebijakan Standard nasional pendidikan di SMK Negeri 1 Balige antara lain sarana dan prasarana dalam pembelajaran produktif, ketidaksiapan siswa dalam pembelajaran produktif dan kurang efektifnya pembelajaran terkait dengan mata pelajaran produktif. Hal ini terlihat dari sisi dimana hanya beberapa murid saja yang menggunakan alat dan bahan untuk pembelajaran produktif.

Hasil temuan di atas masih bersifat sementara, namun memunculkan dugaan bahwa masih terdapat kesenjangan antara apa yang tertuang pada standard nasional pendidikan pada bagian sarana dan prasarana yang ada terkhusus pada bagian pembelajaran produktif di jurusan Teknik Gambar Bangunan. Fenomena kesenjangan ini merupakan permasalahan yang mendasar dan masih perlu dikaji dan dicari pemecahannya.

Ada beberapa faktor yang semestinya menjadi perhatian pemerintah dalam hal implementasi suatu kebijakan, khususnya kebijakan standard nasional pendidikan. Faktor-faktor tersebut seperti : komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana atau disposisi serta faktor birokrasi dan koordinasi pihak yang terlibat. Keempat faktor ini merupakan komponen utama di dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dari keempat faktor ini kita bisa menilai apakah implementasi standard nasional pendidikan berjalan sesuai kebijakan atau tidak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul tentang Implementasi kebijakan yang mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Standard Nasional Pendidikan Bidang Sarana dan Prasarana pada Mata Pelajaran Produktif Program Studi Teknik Gambar Bangunan Di SMK Negeri 1 Balige.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan dalam latar belakang masalah, maka yang menjadi fokus penelitian adalah pemantauan keterlaksanaan implementasi kebijakan standard nasional pendidikan bidang sarana dan prasarana.

Adapun batasan fokus penelitian ini adalah :

- 1) Subjek penelitian dibatasi pada pelaku baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam implementasi kebijakan standard nasional pendidikan bidang sarana dan prasarana pada mata pelajaran produktif keahlian teknik gambar bangunan di SMK Negeri 1 Balige. Orang orang tersebut diasumsikan sebagai sumber data atau sumber informasi di dalam penelitian ini.

- 2) Penelitian ini fokus untuk memantau keterlaksanaan implementasi kebijakan standard nasional pendidikan bidang sarana dan prasarana pada mata pelajaran produktif keahlian teknik gambar bangunan di SMK Negeri 1 Balige dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan standard nasional pendidikan berdasarkan teori George C. Edwards III yang mengidentifikasi ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini, yaitu : *communication* (komunikasi), *resources* (sumber daya), *disposition* (disposisi) dan *bureaucratic structure* (struktur birokrasi).

### **C. Rumusan Masalah**

Permasalahan penelitian ini secara umum adalah: bagaimanakah implementasi kebijakan standard nasional pendidikan bidang sarana dan prasarana pada mata pelajaran produktif keahlian teknik gambar bangunan di SMK Negeri 1 Balige? Permasalahan umum tersebut dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses komunikasi dalam implementasi kebijakan standard nasional pendidikan bidang sarana dan prasarana pada mata pelajaran produktif keahlian teknik gambar bangunan di SMK Negeri 1 Balige?
2. Bagaimana kesiapan sumber daya dalam implementasi kebijakan standard nasional pendidikan bidang sarana dan prasarana pada mata pelajaran produktif keahlian teknik gambar bangunan di SMK Negeri 1 Balige?

3. Bagaimana proses disposisi dalam implementasi kebijakan standard nasional pendidikan bidang sarana dan prasarana pada mata pelajaran produktif keahlian teknik gambar bangunan di SMK Negeri 1 Balige?
4. Bagaimana faktor struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan standard nasional pendidikan bidang sarana dan prasarana pada mata pelajaran produktif keahlian teknik gambar bangunan di SMK Negeri 1 Balige?
5. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di Sekolah SMK Negeri 1 Balige Keahlian Teknik Gambar Bangunan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan standard nasional pendidikan bidang sarana dan prasarana pada mata pelajaran produktif keahlian teknik gambar bangunan di SMK Negeri 1 Balige melalui :

1. Mendeskripsikan proses komunikasi dalam implementasi kebijakan standard nasional pendidikan bidang sarana dan prasarana pada mata pelajaran produktif keahlian teknik gambar bangunan di SMK Negeri 1 Balige.
2. Mendeskripsikan kesiapan sumber daya dalam implementasi kebijakan standard nasional pendidikan bidang sarana dan prasarana pada mata pelajaran produktif keahlian teknik gambar bangunan di SMK Negeri 1 Balige.
3. Mendeskripsikan proses disposisi dalam implementasi kebijakan standard nasional pendidikan bidang sarana dan prasarana pada mata pelajaran produktif keahlian teknik gambar bangunan di SMK Negeri 1 Balige.

4. Mendeskripsikan faktor struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan standard nasional pendidikan bidang sarana dan prasarana pada mata pelajaran produktif keahlian teknik gambar bangunan di SMK Negeri 1 Balige.
5. Membandingkan Kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di SMK Negeri 1 Balige Keahlian teknik gambar bangunan dengan permendiknas nomor 40 tahun 2008.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan Ilmu pengetahuan dibidang pendidikan tentang implementasi standard nasional pendidikan di SMK.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan juga memiliki signifikansi dari segi praktis operasional sebagai berikut:

- a. Kepada Masyarakat Dapat memberikan gambaran tentang implementasi standard nasional pendidikan pada SMK Negeri 1 Balige
- b. Bagi kepala sekolah hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan bidang pendidikan
- c. Bagi guru penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi pihak yang ingin meneliti masalah ini lebih mendalam di masa yang akan datang
- d. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi